



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEPTENIUS MANGNGI BULE LOGO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 216347

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 731.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2858 m2/180 m2 di KAB / KOTA SABU RAIJUA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 81.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/90 m2 di KAB / KOTA SABU RAIJUA, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 821 m2 di KAB / KOTA SABU RAIJUA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA SABU RAIJUA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, ISUZU TFS85HDPRMXG (4X4, DOUBLECAB) PICK UP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 141.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 347.147.844

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.499.797.844

III. HUTANG Rp. 13.145.618

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.486.652.226



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.